



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : RSJD SURAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GINI RATMANTI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 222926

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 857.006.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1085 m<sup>2</sup>/280 m<sup>2</sup> di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.080.000
2. Tanah Seluas 126 m<sup>2</sup> di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 36.128.000
3. Tanah Seluas 1660 m<sup>2</sup> di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 53.200.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m<sup>2</sup>/76 m<sup>2</sup> di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 63.215.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m<sup>2</sup>/60 m<sup>2</sup> di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 54.383.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 225.300.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HADIAH Rp. 5.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.300.000
3. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 53.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 253.534.919**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.388.840.919



III. HUTANG

Rp. 141.872.297

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.246.968.622

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.